

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Dalam teori ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku *agent* dengan pemilik perusahaan adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak *agent* atau bawahannya (Azmi & Januryanti, 2021). Pengungkapan manajemen risiko berhubungan dengan teori keagenan sebab pengungkapan manajemen risiko berhubungan dengan sikap manajer. Hubungan keagenan sebagai satu atau lebih kontrak *principal* (pemilik) menggunakan *agent* (manajer) orang lain untuk menjalankannya aktifitas perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). *Agent* memiliki lebih banyak informasi karena berhubungan langsung dengan kegiatan dari suatu perusahaan, sedangkan *principal* mengandalkan informasi yang diungkapkan oleh *agent* (manajemen) di laporan tahunan perusahaan. Terdapat informasi penting yang dijelaskan oleh *agent* ini biasanya tidak sesuai dengan kondisi aktual dari suatu entitas.

Manajer adakalanya berperan tidak cocok dengan kepentingan pemilik. Dalam aplikasi nyata didalam industri, manajer kerap melanggar kontrak yang sudah mereka sepakati bersama oleh pemilik ialah bertanggung jawab dalam mensejahterakan industri serta meningkatkan kemakmuran pemegang saham, namun dalam realitasnya manajer malah lebih mementingkan kenaikan kesejahteraan buat diri mereka sendiri. Sedangkan pemegang saham juga cenderung ingin sesuatu yang pasti dari pihak manajemen, dan tidak ada keterbatasan maupun asimetri informasi yang diberikan. Sehingga pengungkapan risiko akan menjembatani hubungan antara manajemen dan pemegang saham.

Sedangkan *Good Corporate Governance* berperan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen yang mungkin merugikan pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan terdapat prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* yang perlu diperhatikan agar praktik penyelenggaraannya berjalan lancar seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan,

dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut sudah cukup menggambarkan hubungan yang seharusnya terjadi antara manajemen dan pemegang saham. *Good Corporate Governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Sehingga inti dari kaitan teori agensi dengan variabel penelitian adalah menjembatani hubungan antara manajemen dan pemegang saham secara baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa harus adanya pengawasan agar manajemen dapat terkendali dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat mengurangi risiko yang timbul.

2.2 Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengungkapan manajemen risiko merupakan pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan mengenai bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko terkait masa mendatang (Fathimiyah et al., 2012). Pengungkapan risiko menjadi alat komunikasi antara *stakeholder* dengan perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko merupakan informasi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan dan mengungkapkan dampaknya terhadap masa depan perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko yang tinggi menggambarkan adanya tata kelola risiko perusahaan yang baik, termasuk juga memastikan pengendalian internal perusahaan masih tetap terjaga.

Pengungkapan manajemen risiko adalah suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan tentang apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Kristiono & Al-azhar, 2014). Dalam menghadapi risiko yang berpotensi muncul di masa depan, maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan risiko. Salah satu pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko akan memberikan informasi berupa suatu risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan serta usaha yang dapat dilakukan untuk mengungkap sejauh mana perusahaan dapat mengatasi suatu risiko dan risiko dapat diminimalkan (Ulfa, 2018).

Pengungkapan manajemen risiko dapat membantu pihak perusahaan untuk menginformasikan kepada pihak eksternal perusahaan terkait profil risiko perusahaan dan juga sekaligus berfungsi sebagai sinyal komitmen perusahaan terhadap manajemen risiko. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.

Manajemen risiko adalah proses dimana risiko dapat diterima atau merancang implementasi tindakan untuk meminimalkan signifikan terjadinya peristiwa buruk, manajemen risiko mengacu pada strategi, metode, dan alat pendukung untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko ke tingkat yang dapat diterima (Naji & Ali, 2017). Dengan demikian, manajemen risiko diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan. Manajemen risiko memang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengelola suatu risiko yang dimiliki. ISO 31000 merupakan sebuah standar internasional yang dikeluarkan oleh ISO untuk mengelola risiko. Standar internasional ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan individu. ISO 31000:2018 dapat digunakan untuk seluruh jenis entitas/organisasi dengan semua jenis risiko yang dihadapi.

Tujuan manajemen risiko untuk meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Sedangkan tujuan manajemen risiko berbasis ISO 31000 yaitu Manajemen Risiko Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai, melindungi nilai, membantu pencapaian sasaran perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Bila hal tersebut tidak terjadi, maka ada yang salah dengan penerapan manajemen risiko perusahaan tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa kegunaan atau manfaat yang akan diperoleh (Fahmi, 2018) yaitu :

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk managemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka manfaat manajemen risiko merupakan mencegah perusahaan dari kegagalan, peningkatan laba minimum risiko kerugian bagi perusahaan, dan membuat perusahaan lebih tenang karena dapat mengambil keputusan selalu menghindari risiko, karena adanya perlindungan.

2.2.1 Komponen Kerangka Kerja Pengungkapan Manajemen Risiko

Kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Efektivitas manajemen risiko akan tergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Hal ini membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan terutama manajemen puncak. Pengembangan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pengintegrasian, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko diseluruh organisasi. Organisasi harus mengevaluasi praktik dan proses manajemen risiko yang ada, seperti mengevaluasi setiap kesenjangan dan mengatasi kesenjangan tersebut dalam kerangka kerja. Komponen kerangka kerja dan cara mereka bekerja bersama harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (ISO, 2018) yaitu :

1. Kepemimpinan dan Komitmen (*Leadership and Commitment*)

Kepemimpinan dan komitmen adalah elemen penting dari kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dari dalam

diri seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi seseorang sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen merupakan suatu kewajiban yang dapat mengikat seseorang terhadap sesuatu, baik terhadap dirinya sendiri, maupun kepada orang lain, pada tindakan tertentu atau terhadap hal tertentu. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam penerapan manajemen risiko. Dengan kata lain, pimpinan organisasi memberikan contoh dan komitmen manajemen risiko melalui kebijakan perusahaan, wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan perusahaan (ISO, 2018).

2. Integrasi (*Integration*)

Integrasi dalam sebuah manajemen risiko, berarti manajemen risiko tersebut menyatu menjadi satu kesatuan dalam suatu organisasi. Agar integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen risiko merupakan bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi integrasikan manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan organisasi kepemimpinan dan komitmen, tata kelola, strategi, tujuan, dan operasi (ISO, 2018).

3. Perancangan (*Design*)

Desain merupakan suatu perencanaan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu sistem objek, dan komponen atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi (ISO, 2018).

4. Implementasi (*implementation*)

Implementasi dilaksanakan setelah perancangan manajemen risiko telah dibuat dan ditetapkan. Perancangan manajemen risiko yang diimplementasikan

dengan baik maka dapat dipastikan proses dari *framework* manajemen risiko menjadi bagian dari semua aktivitas dalam perusahaan (ISO, 2018).

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai kesesuaian dan efektivitas aktivitas yang dilaksanakan dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dilakukan untuk mengukur *framework* manajemen risiko secara berkala berupa tujuan, indikator, rencana, implementasi, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut (ISO, 2018).

6. Perbaikan (*Improvement*)

Perbaikan dalam *framework* manajemen risiko terdiri dari perbaikan berkesinambungan dan adaptasi. Perbaikan berkesinambungan adalah perbaikan yang dilakukan secara berkala, sehingga perbaikan ini akan dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian atau kesenjangan dalam meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan. Adaptasi adalah perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan melihat perubahan yang terjadi baik dari lingkungan internal maupun eksternal, serta melakukan perbaikan sesuai dengan perubahan untuk mencapai tujuan organisasi (ISO, 2018).

2.3 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris maupun dewan direksi (Hendro, 2017). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan *good corporate governance* adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur

bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para *stakeholders*.

Kepedulian dunia terhadap *good corporate governance* mulai bertambah tajam semenjak negara-negara asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 serta semenjak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, tercantum Enron *Corporation* serta WorldCom di Amerika, HIH *Insurance Compay Ltd* serta One- Tell Pty Ltd di Australia dan Parmalat di Itali pada dini tahun 2000 an. Hasil analisis yang dicoba bermacam organisasi Internasional serta regulator pemerintah dibanyak negeri menciptakan karena utama terbentuknya kejadian ekonomi atau bisnis yang terdapat sebab lemahnya *corporate governance* dibanyak industri.

Dalam industri perbankan, *corporate governance* merupakan aspek bernilai dalam memelihara keyakinan serta kepercayaan pemegang saham serta nasabah. *Good corporate governance* dialami terus menjadi berarti bersamaan dengan meningkatnya risiko bisnis serta tantangan yang dialami oleh industri perbankan. Dengan mengedepankan tata kelola industri yang baik (*good corporate governance*) serta pengelolaan risiko yang baik, bank diharapkan bisa bebas dari akibat kurang baik krisis perekonomian global. Dalam tiap pengambilan keputusan bisnis mempunyai faktor ketidakpastian serta pula memunculkan risiko. Buat menyikapi perihal tersebut industri perbankan tetap mengelola risiko lewat pengawasan yang efisien serta pengendalian internal bagaikan bagian dari prinsip-prinsip *corporate governance*.

2.3.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good corporate governance mengandung lima prinsip utama yaitu transparansi , akuntabilitas , tanggungjawab , independensi serta kesetaraan menurut (Effendi, 2016) yaitu:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu,

serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Prinsip akuntabilitas ini akan efektif jika masing-masing pihak dapat menjaga tanggung jawabnya dan tidak mencampuri kepentingan pihak lain.

3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi dan warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengutamakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik, serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundangan yang berlaku dan prinsip *good corporate governance*.

5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham harus mendapatkan perlakuan yang sama. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat diperlukan dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha bank.

2.3.2 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pembagian mekanisme pengendali *corporate governance* menjadi 2, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *takeover*. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, *supplier*, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta *stakeholder* lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja, tetapi juga ada komite-komite di bawahnya seperti dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang (Angelita, 2020).

Pada penelitian ini, indikator *corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan komite manajemen risiko.

2.3.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Fathimiyah et al., 2012). Sebagai seseorang yang mengelola perusahaan sekaligus pemegang saham, manajemen tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami kebangkrutan. Keadaan ini akan merugikan baik sebagai manajemen atau sebagai pemegang saham. Sebagai pihak manajemen akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan return atau pun dana yang di investasikannya (Prayoga&Almilia, 2013). Manajemen bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang telah dilakukan dengan melakukan pengungkapan laporan tahunan. Jika semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen pada perusahaan, maka manajemen perusahaan cenderung lebih giat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan pemegang saham dimana

adalah dirinya sendiri yaitu dengan mengungkapkan pengungkapan manajemen risiko dengan lebih luas (Prayoga&Almilia,2013).

Manajemen sangat berperan dalam menjalankan usaha suatu perusahaan, tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga sebagai pemegang saham dimana manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Prayoga & Almilia, 2013). Salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya agen adalah meningkatkan kepemilikan saham manajemen. Peran manajemen dalam hal ini tidak hanyadalam mengelola perusahaan dengan baik tetapi juga mengontrol serta mengawasi jalannya perusahaan. Sehingga semakin besar kepemilikan oleh manajemen maka akan cenderung lebih memonitoring kegiatan perusahaan.

2.3.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Mubarok, 2013). Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengontrol pihak manajemen dengan proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan manipulasi informasi mengenai risiko yang akan diungkapkan. Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan risiko perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang diungkapkan melalui reaksi pasar atas pengungkapan risiko dalam annual *report* perusahaan.

Persentase kepemilikan saham (ekuitas) oleh institusi atau lembaga merupakan persentase yang menjadi proksi penelitian ini dalam menggambarkan kepemilikan institusional di perusahaan yang dihubungkan dengan pengungkapan risiko. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusi diyakini bahwa perusahaan harus menyebarkan secara lebih informasi mengenai risiko. Hal ini dikarenakan pemegang saham atau investor memerlukan lebih banyak dan luas informasi

mengenai risiko tersebut sebagai bentuk pengendalian (Mubarok, 2013).

2.3.2.3 Dewan Komisaris Independen

Dalam upaya memberdayakan pengawasan dewan komisaris, keberadaan dari komisaris independen sangat dibutuhkan karena dalam lingkungan sekitar sering ditemukan transaksi yang mengabaikan kepentingan para pemegang saham publik serta stakeholder lainnya. Tujuan dari komisaris independen yaitu untuk mendorong terciptanya keadaan yang lebih objektif dan menaruh kesetaraan diantara para kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholder*.

Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 2014).

2.3.2.4 Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Mubarok, 2013). Menurut teori keagenan, ukuran komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Mubarok, 2013). Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih

bertanggungjawab, terbuka, dalam pelaporan keuangan dan menghindari praktik manipulasi pengungkapan informasi mengenai risiko karena komite audit akan memonitor kegiatan yang ada di perusahaan. Sehingga dengan semakin besarnya ukuran komite audit, maka akan semakin besar juga pengawasan yang harus dilakukan atas luas informasi yang diungkapkan dalam annual report. Ukuran komite audit adalah jumlah orang yang berperan menjadi anggota dalam komite audit. Jumlah tersebut menjadi proksi dalam mewakili ukuran komite audit yang dapat menjelaskan pengaruhnya dengan pengungkapan risiko di annual report perusahaan (Kencana & Lastanti, 2018).

2.3.2.5 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Komite manajemen risiko merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bertugas untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan memastikan diterapkannya manajemen risiko perusahaan (Agista & Mimba, 2017). Komite manajemen risiko bertugas untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengawasi, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tanggung jawab atas pengelolaan risiko berada ditangan komisaris dan direksi. pengelolaan risiko diperusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi risiko potensial, penilaian risiko, serta evaluasi dampak risiko terhadap perusahaan termasuk risiko keuangan , pengendalian risiko, sampai transfer risiko dan pendanaan risiko. Ruang lingkup manajemen risiko mencakup risiko keuangan yang berkaitan dengan kekayaan fisik perusahaan, risiko tanggung jawab hukum, risiko sumber daya manusia, serta risiko usaha yang merupakan risiko spekulatif.

Dalam pembentukannya, komite manajemen risiko dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko atau komite manajemen risiko, dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal (Hartanti, 2018). Saat ini pemerintah melalui peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank

Umum hanya mewajibkan perbankan untuk membentuk komite manajemen risiko sebagai komite pengawas risiko. Berbeda dari industri perbankan yang diregulasi secara ketat, pembentukan komite manajemen risiko pada sektor industri lain di Indonesia masih bersifat sukarela. Meskipun demikian, mengingat pengelolaan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup atas struktur dan operasi perusahaan maka banyak perusahaan selain perbankan tetap membentuk komite pengawas manajemen risiko.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat dikategorikan dengan besar kecilnya suatu perusahaan (Sarwono et al., 2018). Semakin besar perusahaan maka semakin banyak *stakeholder* yang ikut andil di perusahaan tersebut (Syifa, 2013). Banyaknya *stakeholder* yang ikut andil dalam perusahaan menyebabkan banyaknya pula informasi yang harus disajikan kepada *stakeholder*. Informasi yang disajikan kepada *stakeholder* harus bersifat relevan dan lengkap. Salah satu informasi yang harus disajikan dengan relevan dan lengkap adalah manajemen risiko, supaya *stakeholder* mengetahui tentang pengelolaan risiko yang dilakukan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Perusahaan dengan skala besar diyakini mampu untuk memenuhi segala kewajibannya serta mampu memberikan tingkat pengembalian atas investasi para investor.

Pada umumnya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kegiatan operasi dan investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan manajemen risiko yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik (Kristiono & Al-azhar, 2014). Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Fathimiyah et al., 2012). Total aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market *capitalized* dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan (Putri, 2012). Salah satu tolak ukur yang

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi maupun investasi perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak informasi yang akan diungkapkannya. Serta semakin detail pula hal-hal yang akan diungkapkan karena perusahaan besar dianggap mampu untuk menyediakan informasi tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini:

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Swarte et al., 2019)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan , komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan, kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan , kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan , komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko
2.	(Sihombing, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko.	Leverage, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, profitabilitas , likuiditas, struktur kepemilikan publik dan struktur manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

3.	(Prabowo, 2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Komisaris independen , jumlah anggota dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan publik dan <i>risk management committee</i> tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .
4.	(Istiqomah, 2020)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.	Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko , <i>leverage</i> , profitabilitas, ukuran komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
5.	(Lokaputra, 2022)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.	Kepemilikan manajerial berpengaruh , kepemilikan institusional berpengaruh , komisaris indenpenden tidak berpengaruh signifikan , komite audit berpengaruh , faktor komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan jasa keuangan non bank di Bursa Efek Indonesia.
6.	(Oktaviana	Pengaruh <i>Good</i>	Komisaris independen , ukuran

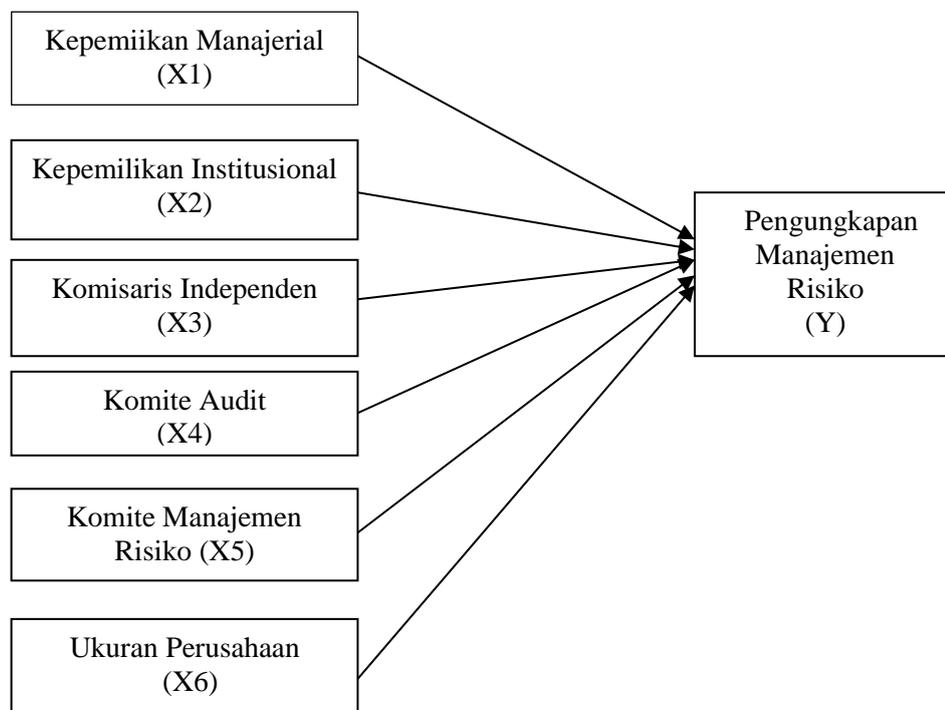
	& Puspitasari, 2022)	<i>Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management.</i>	dewan komisaris , dan reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management.</i>
--	----------------------------	---	---

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian

Model kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.3 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Apabila semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen pada suatu perusahaan, sehingga manajemen perusahaan cenderung lebih giat melaksanakan tanggung jawabnya untuk kepentingan pemegang saham dimana adalah dirinya sendiri,

yaitu dengan mengungkapkan pengungkapan manajemen risiko dengan lebih luas (Swarte et al., 2019). Manajemen bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang dilakukan dengan melakukan pengungkapan laporan tahunan. Pengungkapan informasi manajemen risiko yang dilakukan manajemen bertujuan untuk meningkatkan *image* perusahaan. Oleh karena itu, besarnya proporsi kepemilikan manajerial mempengaruhi kinerja dalam pengungkapan risiko manajerial (Swarte et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Adam et al.,2016), (Siswanto, 2013), (Rosiany, 2019), dan (Fauziah,2013) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis pertama adalah:

H₁:Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

2.7.2 Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan manajemen risiko perusahaan lebih cenderung bertanggung jawab atas tekanan eksternal untuk memasang kontrol yang terkait dengan manajemen risiko suatu perusahaan (Kusumaningrum, 2013).

Peningkatan kepemilikan institusional (lebih dari 5%) akan menyebabkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer, sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Investor institusional akan lebih memilih dan mendukung kebijakan yang dapat meningkatkan insentif jangka panjang bagi perusahaan. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam

meminimalkan risiko yang ada (Rachmadan, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rachmadan, 2013) dan (Kusumaningrum, 2013) yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis kedua adalah:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

2.7.3 Komisaris Independen dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2016). Adanya komisaris independen sebagai media dalam meningkatkan kualitas pemantauan terhadap perencanaan dan implementasi manajemen risiko yang kemudian berdampak pada pencegahan terhadap kecurangan, dan perilaku oportunistik dari pihak manajemen (Swarte et al., 2019).

Independensi dewan komisaris dapat mencerminkan tingkat transparansi dalam perusahaan. Fungsi pengawasan dewan komisaris yang baik tidak hanya berdasarkan pada kuantitas komisaris independen dalam suatu perusahaan, namun lebih ditentukan pengalaman, kompetensi dan komitmen dalam menerapkan dan mengungkapkan manajemen risiko serta spesialisasi yang sesuai dengan bidang perusahaan, sehingga menunjang dewan komisaris independen untuk memahami profil risiko sesuai dengan bidang perusahaan (Agista & Mimba, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Swarte et al., 2019), (Sulistyaningsih & Gunawan, 2016) dan (Wicaksono & Adiwibowo, 2017) berpendapat bahwa Komisaris independen punya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen resiko perusahaan. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesi ketiga adalah:

H₃:Komisaris independen berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

2.7.4 Komite Audit dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantumelaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Jumlah komite audit dalam perusahaan minimal tiga orang. Dalam peraturan tersebut terdapat persyaratan yang lebih ketat atas keanggotaan komite audit dan adanya tugas dan tanggung jawab yang lebih besar yang harus ditanggung oleh komite audit. Aturan tersebut mengindikasikan diperlukannya komite audit yang lebih kompeten dan peran komite audit dalam memastikan kualitas tata kelola perusahaan dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan. Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewankomisaris diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan. Semakin besar anggota komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan manajemen risiko (Mubarok, 2013) .

Penelitian yang dilakukan oleh (Swarte et al.,2019), (Dewi, 2018), (Oktarina, 2015), dan (Mubarok, 2013) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis keempat adalah:

H₄: komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

2.7.5 Komite Manajemen Risiko dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang bertugas untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan memastikan diterapkannya manajemen risiko perusahaan (Agista & Mimba, 2017). Komite manajemen risiko paling sedikit beranggotakan tiga orang yang terdiri dari satu komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite dan dua orang lain terdiri dari anggota dewan komisaris atau anggota komite yang tidak merangkap sebagai dewan komisaris dan pihak yang berasal dari luar perusahaan. Keberadaan komite manajemen dapat meningkatkan kualitas

penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi (Utami, 2015). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga pengungkapan manajemen risiko menjadi lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2015), (Setiawan, 2016), dan (Putri, 2012) menunjukkan komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis kelima adalah:

H₅: komite manajemen risiko berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.

2.7.6 Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Manajemen Risiko

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat dikategorikan dengan besar kecilnya suatu perusahaan (Sarwono et al., 2018). Semakin besar perusahaan maka semakin banyak *stakeholder* yang ikut andil di perusahaan tersebut (Syifa, 2013). Banyaknya *stakeholder* yang ikut andil dalam perusahaan menyebabkan banyaknya pula informasi yang harus disajikan kepada *stakeholder*. Informasi yang disajikan kepada *stakeholder* harus bersifat relevan dan lengkap. Pada umumnya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kegiatan operasi dan investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan manajemen risiko yang lebih untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik (Kristiono & Al-azhar, 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sarwono et al., 2018), (Jannah, 2016), dan (Tarantika & Solikhah, 2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₆: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan manajemen risiko.